



2022

R-LPPD

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BUPATI

FRANKY DONNY WONGKAR, SH



WAKIL BUPATI

Pdt. PETRA YANI REMBANG

**KABUPATEN
MINAHASA SELATAN**

**PROPINSI
SULAWESI UTARA**

R-LPPD KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,32	72,89	0,788
2	Angka Kemiskinan	9,37	9,00	-3,949
3	Angka Pengangguran	4,90	5,77	17,755
4	Pertumbuhan Ekonomi*	4,91	10,53	114,46
5	Pendapatan Per kapita**	40.133.976,36	43.556.990,04	8,529
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,366	0,382	4,372

* diisi dengan PDRB Harga Berlaku

** diisi dengan angka PDRB Per Kapita.

Sumber : Buku Minsel Dalam Angka 2022 dan Buku PDRB 2021- Bapelitbang Minahasa Selatan.

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	65.24	
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.01	
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95.9	
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98.11	
2	KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.12	
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100	
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60.14	
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60.23	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
		1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	
3	PEKERJAAN UMUM	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten	0	tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk penanganan infrastruktur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan Propinsi
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	0	tidak dapat di sajikan dengan alasan untuk penanganan infrastruktur wilayah sungai (WS) Menjadi kewenangan Propinsi
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	24.69	
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	73.99	
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.94	
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	
		1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	54.59	
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	untuk jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan oprator dan teknis analis tidak dapat di sajikan karena tenaga kerja kontruksi belum menyampaikan bukti sertifikat pelatihan
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	
4	PERUMAHAN RAKYAT	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	20.02	
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	24.35	
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.07	
5	TRANTIB DAN LINMAS	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
6	SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	24.46	
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	
7	TENAGA KERJA	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	belum ada RTKD
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	tidak memiliki BLK dan instruktur yang bersertifikat kopetensi serta tidak memiliki anggaran
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0	tidak ada dokumen
		2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah kabupaten	100	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0	Tidak dapat disajikan dengan alasan tidak memiliki data mengenai ARG pada belanja langsung APBD
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.03	
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,725	
9	PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	496.12	
10	PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Tidak dapat disajikan dengan alasan izin lokasi sudah di ganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)
		2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0	tidak tersedianya data penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
		2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0	tidak tersedia karena tidak ada
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	tidak dapat kami sajikan dengan alasan tanah objek landreform yang di redistribusikan pada tahun 2022 berasal pada tahun 2022 bersala dari pelepasan kawasan hutan, bekas hak guna usaha dan tanah negara lainnya dengan total 754 bidang tanah
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	tidak dapat di sajikan dengan alasan tidak ada layanan pertanahan yang memiliki output dokumen izin membuat tanah
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	tidak dapat di sajikan dengan alasan tidak ada pengaduan tentang sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi
11	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	44.72	
		2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten	31.73	
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	100	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	84.03	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	12.39	
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	88.82	
		2.k.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	21.21	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.l.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	Tidak dapat disajikan dengan alasan sesuai dengan indeks desa membangun tahun 2022 untuk kabupaten Minahasa Selatan sudah tidak terdapat lagi desa tertinggal
		2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	68.75	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		tidak dapat di sajikan dengan alasan brlum tersedianya data kelahiran penduduk berkelompok umur, belum adanya data kependudukan dari instansi terkait serta perhitungan TFR di dasarkan pada data kelahiran tiap 5 tahun sekali
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	33.32	
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6.36	
15	PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten	51.6	
		2.n.2	V/C Ratio di Jalan kabupaten		kegiatan tidak terakomodir dalam APBD 2022
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	57.58	
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	tidak dapat disajikan dengan alasan Di Dinas Komunikasi dan Informatika belum adanya layanan publik secara online karena belum adanya perhatian spesifik pemerintah terhadap layanan publik secara online dan terintegrasi.
		2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kabupaten	50	
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	0.09	
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	3.02	
18	PENANAMAN MODAL	2.q.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	10.94	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2	
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10.6	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	12	
20	STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	
		2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	
21	PERSANDIAN	2.t.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Tidak dapat disajikan dengan alasan tidak ada kegiatan pengamanan informasi di sepanjang tahun 2022 pada bidang persandian karena tidak ada program kegiatan
		2.t.2	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Tidak dapat kami sajikan dengan alasan belum adanya sistem elektronik/asset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah, karena tidak ada program kegiatan dan kurangnya sumber daya manusia di bidang tersebut
		2.t.3	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	tidak dapat disajikan dengan alasan tidak ada kegiatan pengamanan titik informasi, karena tidak tercantum pada program kegiatan
22	KEBUDAYAAN	2.u.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	19,44	
23	PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.662	
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	tidak ada karena tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut
24	KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	16.25	
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	35.67	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP)	122.03	
26	PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Tidak ada wisman tahun n-1 karena Covid
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	15.7	
		3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	17,407.80	
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0.34	
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3.74	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
27	PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	488.88	
		3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	675	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.e.1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	0	dengan ini menyatakan bahwa presentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang miliki ijin di Minahasa selatan sebanyak 0
30	PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	7.08	
		3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2.22	
31	PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	36.61971831	
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	tidak dapat disajikan dengan alasan provinsi sulawesi utara belum ada penetapan RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) dan kabupaten Minahasa Selatan saat ini belum ada penetapan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) berdasarkan indikator pembangunan industri dalam RIPIN
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	tidak dapat kami sajikan dengan alasan jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan dan jumlah izin yang di keluarkan di kabupaten minahasa selatan paDA TAHUN 2022=0 karena pendaftaran pengurusan ijin usaha industri (IUI) dan industri menengah saat ini oleh pelaku usaha di lakukan melalui Online Singel Submission (OSS) yaitu sistem perisinan berusaha terintegritas secara elektronik
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	tidak dapat kami sajikan dengan alasan jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan dan jumlah izin yang di keluarkan di kabupaten minahasa selatan paDA TAHUN 2022=0 karena pendaftaran pengurusan ijin usaha industri (IPIU) dan industri menengah saat ini oleh pelaku usaha di lakukan melalui Online Singel Submission (OSS) yaitu sistem perisinan berusaha terintegritas secara elektronik
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	0	tidak dapat disajikan dengan alasan jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Di Kabupaten Minahasa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK HASIL / OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten		Selatan tahun 2022 = 0 karena pendaftaran pengurusan izin usaha kawasan industri (UIKI) Dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) saat ini saat ini oleh pelaku usaha di lakukan melalui Online Singel Submission (OSS) yaitu sistem perisinan berusaha terintegritas secara elektronik
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	tidak dapat disajikan dengan alasan dinas perdagangan tidak memiliki data tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini di Kabupaten Minahasa Selatan

C. Hasil EPPD tahun 2021 = belum ada SK Mendagri tentang penetapan hasil EPPD. Kemudian untuk Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 = WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	%
A	PENDAPATAN DAERAH	940,840,805,907	918,498,434,001	22,342,371,907	97.63
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32,535,140,583	29,128,663,649	3,406,476,934	89.53
1	Pajak Daerah	15,418,000,000	13,370,501,516	2,047,498,484	86.72
2	Retribusi Daerah	4,532,838,928	2,572,143,919	1,960,695,009	56.74
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,455,000,000	1,058,899,838	396,100,162	72.78
4	Lain-lain PAD yang Sah	11,129,301,655	12,127,118,376	997,816,721	108.97
II	Dana Perimbangan	692,858,421,553	696,569,026,935	(3,710,605,382)	100.54
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16,674,165,237	31,359,922,059	(14,685,756,822)	188.07
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	501,161,793,000	501,161,793,000	-	100.00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84,120,376,000	78,084,130,852	6,036,245,148	92.82
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90,902,087,316	85,963,181,024	4,938,906,292	94.57
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37,912,033,000	14,528,339,920	23,383,693,080	32.32
1	Pendapatan Hibah	7,356,000,000	6,333,352,141	1,022,647,859	86.10
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19,829,913,000		19,829,913,000	0
3	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10,726,120,000	8,194,987,779	2,531,132,221	76.40
B	BELANJA	954,256,127,861	890,362,417,996	63,893,709,865	93.30
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	639,538,035,146	611,305,035,345	28,232,999,801	95.59
1	Belanja Pegawai	395,956,841,906	388,417,221,072	7,539,620,834	98.10
2	Belanja Hibah	25,740,113,000	5,474,921,859	20,265,191,141	21.27
3	Belanja Bantuan Sosial	110,000,000	110,000,000	-	100.00
4	Belanja Tidak Terduga	2,715,002,900	2,383,522,420	331,480,480	87.79
5	Belanja Bagi Hasil	1,113,541,146	1,099,627,646	13,913,500	98.75
6	Belanja Bantuan Keuangan	213,902,536,194	213,819,742,348	82,793,846	99.96
II	BELANJA LANGSUNG	314,718,092,715	279,057,382,651	35,660,710,064	88.67
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Modal	87,107,054,603	73,057,449,037	14,049,605,566	83.87
3	Belanja Barang dan Jasa	227,611,038,112	225,132,258,481	2,478,779,631	98.91
C	SURPLUS / (DEFISIT)	(13,415,321,954)	28,136,016,005	(41,551,337,959)	(209.73)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
D	PEMBIAYAAN			-	
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13,415,321,954	13,415,321,954	-	100.00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13,415,321,954	13,415,321,954	-	100.00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
III	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	41,551,337,958.57	41,551,337,958.57	0
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	41,551,337,958.57	41,551,337,958.57	0
E	PEMBIAYAAN NETTO	13,415,321,954.00	13,415,321,954.07	0.07	100.00
F	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	41,551,337,958.57	41,551,337,958.57	0

E. INOVASI DAERAH

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1.	Coaching Clinic Bagi Calon Kepala Sekolah Penggerak Tahun 2022	Sekolah yang lulus Calon Sekolah Penggerak yaitu 13 sekolah yang terdiri dari 1 TK/PAUD, 5 Sekolah dasar dan 7 Sekolah Menengah Pertama yang merupakan terbanyak di Sulawesi Utara	Penghargaan dari Kemdikbudristek melalui BPMP Sulawesi Utara sebagai Kabupaten dengan jumlah Calon Sekolah Penggerak terbanyak di Sulawesi Utara tahun 2022
2.	Coaching Clinic Bagi Calon Guru Penggerak Dan Pengajar Praktik Tahun 2022	Terdapat 11 Calon guru penggerak angkatan 4 47 Calon guru penggerak angkatan 7 56 Calon guru penggerak angkatan 8	1. Penghargaan dari Kemdikbudristek melalui Balai Guru Penggerak Sulawesi Utara kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah pelaksana program guru penggerak yang telah mengangkat guru penggerak menjadi kepala sekolah 2. Penghargaan dari Kemdikbudristek melalui Balai Guru Penggerak Sulawesi Utara kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah yang mendukung program prioritas Kemdikbudristek tahun 2022
DINAS KESEHATAN			
1.	Pemberian Sertifikat (IDL) Imunisasi Dasar Lengkap bagi bayi dan balita yang telah mendapatkan imunisasi dengan lengkap	Mendapatkan predikat MADYA dalam Semiloka Nasional ke 2 Apkesmi yang diselenggarakan di Padang	1. Piagam penghargaan lomba Inovasi Puskesmas dalam rangka Semiloka Nasional ke 2 Apkesmi yang diselenggarakan di Padang. 2. Piagam Penghargaan Gubernur Sulawesi

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
			Utara atas pencapaian lomba Inovasi Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2022
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1.	Nama Inovasi "Minsel Terang" Konsep Inovasi adalah Efisiensi dan Konversi	Efisiensi Anggaran Pemabayaran PJU yang sangat signifikan kemudian hasil efisiensi dikonversikan ke penambahan dan perbaikan titik lampu PJU.	Belum Ada
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1.	Layanan PUSDALOPS	1. Update data cuaca setiap saat. 2. Tersedianya informasi sebelum terjadinya/peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi. 3. Informasi bencana alam.	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
1.	Pembinaan kepada Perusahaan-perusahaan	Perusahaan besar, Perusahaan menengah dan Perusahaan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Penghargaan k3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kepada Bupati Minahasa Selatan sebagai Pembina • Piagam Siddhakarya kepada Bupati Minahasa Selatan atas dukungan dan Pembinaan kepada Perusahaan yang telah berhasil mendapatkan Penganugerahan Produktifitas Siddhakarya tahun 2020
2.	Pembinaan perusahaan-perusahaan	Perusahaan besar, Perusahaan menengah dan Perusahaan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam penghargaan produktivitas (siddhakarya) tahun 2022 dari Gubernur Sulawesi Utara Kepada Perusahaan Menengah PT.Nichindo Suisan Manado Jenis Usaha Pengolahan ikan kayu Alamat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
DINAS KETAHANAN PANGAN			
1.	Mengadakan Pelaksanaan Pasar Murah untuk masyarakat yang terdampak kenaikan tarif angkutan dan dalam menekan inflasi.	Masyarakat bisa merasakan harga pangan yang lebih murah	Tidak ada
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1.	CAFE PEJUANG LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi sampah plastik, kertas/kardus; - Mengubah kebiasaan masyarakat secara khusus ASN di lingkungan kantor 	Masuk dalam nominasi Inovation Government Award

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
		bupati tentang cara pandang bahwa sampah tidak bernilai, namun dengan Cafe Pejuang Lingkungan, sampah plastik, kertas/kardus dapat di tukar dengan Kopi dan menu makanan lainnya.	
2.	BANK SAMPAH : 1) BS Bersatu Desa Teep 2) BS Ezra Jaya Kel. Kawangkoan Bawah 3) BS Cipta Sejahtera Lestari Kel. Rumoong Bawah 4) BS Maesa Desa Rumoong Bawah 5) BS Liberty Kel. Bitung 6) BS Karya Fajar Pagi Kel. Ranomea 7) BS Talitakum Kel. Pondang 8) BS Karyata Desa Lopana 9) BS Karunia Desa Tumpaan 10) BS Blante Sampah Desa Rap-rap	- Mengurangi sampah plastik, kertas/kardus; - Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petugas kebersihan sebagai nasabah.	Belum ada
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
1.	JEMPUT BOLA	95	Tidak ada
2.	PELAYANAN FIVE IN ONE	85	Tidak ada
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.	Pelayanan KB Seribu Akseptor	Terlaksananya pelayanan KB MKJP bagi pasangan usia subur di 17 Kecamatan	Juara II pelayanan KB MKJP tingkat Provinsi Sulawesi Utara
2.	Lomba Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi	Meningkatnya peran serta dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, kelompok kerja dan mitra kerja untuk pengembangan dan peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas	Desa Tangkuneu Juara I dan Desa Wiau Lapi Juara III Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
DINAS PERHUBUNGAN			
1.	PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN e-BLUE (<i>Bukti Lulus Uji Elektronik</i>)	SISTEM LAYANAN APLIKASI YANG TERINTEGRASI DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI, SERTA MENGAKOMODIR PEMBAYARAN NON-TUNAI (<i>KODE BILLING</i>)	LAUNCHING e – BLUE OLEH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA FORKOPIMDA
2.	TERSEDINYA APLIKASI DATA ANGKUTAN KENDARAAN UMUM DALAM BENTUK APLIKASI WEB ‘SISTEM INFORMASI ANGKUTAN (SIM)’	APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGKUTAN (<i>dishubminsel.my.id</i>)	LAUNCHING e – BLUE OLEH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA FORKOPIMDA
3.	PENINGKATAN CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BIDANG PELAYARAN DAN ASDP MELALUI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	CAPAIAN PAD SEBESAR 240 %	-

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
4.	TERSUSUNNYA RENCANA AKSI KESELAMATAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023 - 2028	TERSEDINYA PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023 - 2028	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	Melaksanakan Penerapan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan		Tidak Ada
DINAS KOPERASI DAN UMKM			
1.	PELAKSANAAN BAZAR NATAL UMKM	MEMPROMOSIKAN PRODUK-PRODUK OLAHAN YANG ADA DI MINAHASA SELATAN KHUSUSNYA PELAKU UMKM.	SERTIFIKAT/ PIAGAM UNTUK PELAKU UMKM
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1.	Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Menghibahkan Dana ke KONI Kabupaten Minahasa Selatan kemudian KONI memberikan Insentif sejumlah Dana untuk Memotivasi para Atlit Cabang Olahraga agar berprestasi pada tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.	1. Bidang Olahraga Tingkat Nasional/Internasional a) a. Sea Games 31 Hanoi b) Games Hanoi 31 c) Singapura Open d) Asian Championship Atletik e) Thailand Open f) MMA g) Kejurnas U.18 Atletik h) PON PARALYMPIC Cabang Tenis Meja i) SOERATIN CUP U-17 j) SOERATIN CUP U-17 2. Bidang Olahraga Tingkat Provinsi <i>Pekan Olahraga Provinsi</i>	- 2 Medali Perak 1 Medali Emas 2 Medali Emas 2 Medali Emas - 2 Medali Emas 1 Medali Emas, 1 Perak, dan 1 Perunggu. Juara Zona SULUT - 14 Medali Emas, 14 Medali Perak dan 35 Perunggu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH			
1.	Cafe Perjuangan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)	Mengikuti Penilaian Inovasi Government Award (IGA) Tingkat Nasional	-
2.	Jempol Hebat Jemput Bola (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Mengikuti Penilaian Inovasi Government Award (IGA) Tingkat Nasional	-
3.	Minsel Terang	Mengikuti Penilaian Inovasi Government Award (IGA) Tingkat Nasional	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			
1.	Meningkatkan Minat Baca Anak	Adanya Bunda Literasi se Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan	
DINAS PERIKANAN			
1.	" KUSUKA Pintar" Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Hasil Perikanan, Pedagang/Tibo2) yang mampu menggunakan kemajuan teknologi digital berbasis android dengan berbagai aplikasi sektor perikanan	- Dengan Aplikasi SATU DATA dan PILAR KKP Nelayan dan pembudidaya ikan terdaftar dalam database dan menerima Kartu KUSUKA dari BANK BNI - Melalui Aplikasi LAUT NUSANTARA, nelayan dapat mengetahui posisi serta	Bertambahnya alokasi bantuan pemerintah dikarenakan banyaknya data nelayan dan pembudidaya ikan dalam database KUSUKA

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
		merencanakan penangkapan ikan.	
DINAS PERTANIAN			
1.	GERAKAN "MARI JO BA TANAM"	TERLAKSANANYA "GERAKAN MARIJO BATANAM" YANG MEMBERIKAN STIMULASI BAGI MASYARAKAT MINAHASA SELATAN UNTUK MENGOPTIMALKAN LAHAN YANG ADA BAIK LAHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MAUPUN PEKARANGAN RUMAH ATAU INSTANSI, SEHINGGA MENDORONG SEKTOR PERTANIAN MENJADI PENGGERAK PEMULIHAN EKONOMI DARI DAMPAK COVID-19.	-
DINAS PERDAGANGAN			
1	Perjanjian Kerjasama Bidang Metrologi Legal antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kota Manado yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan	Ditandatangani Perjanjian Kerjasama Bidang Metrologi Legal antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kota Manado oleh Bupati Minahasa Selatan dan Walikota Manado sehingga pelaksanaan Tera/Tera ulang di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan aturan yang ada	
2.	Bantuan Sosial Uang kepada pelaku usaha IKM	Terlaksananya Program Bantuan Sosial Uang kepada pelaku usaha IKM dalam rangka pengendalian inflasi dengan anggaran sebesar Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	-
3.	Usulan Pembangunan Sentra IKM di Kabupaten Minahasa	Disetujuinya usulan Pembangunan Sentra IKM di Kabupaten Minahasa oleh Dinas Perdagangan melalui dana DAK oleh Kementerian Perindustrian dengan anggaran sebesar Rp. 9.150.359.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Pembangunannya akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2023	
4.	Pelatihan keterampilan pengolahan tempurung kelapa bagi pengrajin perempuan pemula di Kabupaten Minahasa Selatan	Terlaksananya Pelatihan keterampilan pengolahan tempurung kelapa bagi pengrajin perempuan pemula di Kabupaten Minahasa Selatan oleh Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kab. Minahasa Selatan	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT			
1.	Sistem Absen Pegawai Meningkatkan Kehadiran Pegawai	Meningkatnya kehadiran PNS	

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
1.	PENGELOLAAN KEUANGAN	<p>Pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai 3 program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah <p>Untuk melaksanakan program-program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan mendapat pagu setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 243.436.645.674 Dengan Realisasi Anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 239.651.330.123 atau 98,45% dari pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan</p>	Tahun 2021 mendapat Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
1.	Terintegrasinya Sistem Informasi Pajak antara DPMPSTP dan BAPENDA	Integerasi Data sesuai Indikator MCP KPK	Dalam capaian Semester II Tahun 2022 diberikan penilaian sebagai sebagai Kabupaten "DIGITAL" dalam Pelaksanaan
2.	Aplikasi Pajak Daerah Berbasis Andriod (<i>mytax minsel</i>)	Tersedianya Aplikasi Android yang memudahkan Wajib Pajak untuk mengakses Informasi dan pembayaran Non Tunai	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dimana tahun sebelumnya hanya mencapai Kabupaten "BERKEMBANG", naik 2 tingkat menjadi Kabupaten "DIGITAL".
BAGIAN ORGANISASI			
1.	Evaluasi jabatan (evajab)	Untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar menentukan standar dan pola yang sama dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan dari masing-masing jabatan yang ada di setiap instansi pemerintah.	
2.	SiHebat (Sistem Hasil Evaluasi Jabatan)	Aplikasi untuk percepatan proses evaluasi jabatan, sehingga dapat mempermudah pemerintah daerah melakukan evaluasi jabatan. Melalui aplikasi SiHebat, proses evaluasi jabatan oleh masing-masing instansi dapat dilakukan dengan lebih mudah karena sudah ada rumusnya. Dengan memasukkan nama jabatan melalui aplikasi SiHebat, maka dapat langsung diketahui standar	

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
		kelas jabatan serta analisis harga jabatan.	
3.	E-Sakip Reviu (esr.menpan.go.id)	E-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.	Nilai didapatkan yaitu CC dan dokumen resmi tentang penilaian SAKIP akan diupload oleh Kemenpan RB melalui Aplikasi E-SAKIP Review
4.	SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)	SIPPN Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku pengguna layanan publik.	
BAGIAN EKONOMI			
1.	Sistem Evaluasi dan Monitoring dibidang perekonomian secara Virtual.	Terlaksananya evaluasi dan monitoring dibidang perekonomian.	Prioritas dalam penyusunan dokumen usulan maupun perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
1.	Media Sosial Facebook (Fan Page) Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Antusias yang tinggi dari masyarakat yg ingin melihat kegiatan atau giat dari Sekretaris Daerah dan Bagian-Bagian yang ada di Sekretariat Daaerah Kabupaten Minahasa Selatan	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
1.	Pembuatan Gambar Alur Pendaftaran Penyedia Baru pada LPSE	Terlaksananya Proses Pendaftaran yang memudahkan Penyedia.	Tidak ada
2.	Pembuatan Surat Masuk dan Surat Keluar melalui <i>Google Form</i>	Terlaksananya Proses Surat Masuk dan Suat Keluar lewat Aplikasi	
3.	Pembuktian Kualifikasi Pada Proses Pemilihan Penyedia di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Menggunakan <i>Google Form</i>	Terlaksananya Proses pemilihan Penyedia dengan menggunakan aplikasi	
4.	Penggunaan <i>Google Sheet</i> untuk efektifitas lembar kerja evaluasi penawaran	Lembar Kerja Evaluasi Penawaran lebih efektif dengan menggunakan Aplikasi	
5.	Pembuatan Register Pengadaan langsung dilingkungan Sekretariat Daerah dengan menggunakan <i>Google Sheet</i>	Register Pengadaan yang lebih efektif dalam pencatatan	

NO.	INOVASI	CAPAIAN KEBERHASILAN	PENGHARGAAN YANG DITERIMA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
1.	Pemberian Reward pada Perangkat Daerah yang memasukkan Laporan EPRA tepat waktu dan Pemberian Punishment pada Perangkat Daerah yang memasukkan Laporan EPRA terlambat atau tidak memasukkan.	Tingkat kepatuhan memasukkan laporan meningkat.	
BAGIAN KERJASAMA			
1	Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Pelayanan Administrasi Lengkap Urusan Kerja Sama (Si MAPALUS) dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Pembangunan struktur dasar Sistem Manajemen Pelayanan Administrasi Lengkap Urusan Kerja Sama (Si MAPALUS)	-

Amurang, 29 Maret 2023

BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR, SH